

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Permasalahan

Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara didunia. Akan tetapi, implementasi demokrasi di setiap negara bisa berbeda-beda. Negara yang otoriter sekalipun seperti di negara-negara komunis serta berbagai negara yang didominasi oleh militer juga ikut-ikutan dalam klaim sebagai negara demokrasi. Secara formal, di negara tersebut memang ada ornamen demokrasi, seperti partai politik, pemilihan umum, organisasi kemasyarakatan, media massa dan parlemen. Tetapi bila kita telisik lebih jauh pada negara penganut paham otoriter dan negara lain dengan dominasi militer tersebut, kita dapat melihat bahwa semua ornamen demokrasinya berada dibawah kekuasaan penguasa dan tunduk terhadapnya.

Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan sebuah substansi dasar yang harus dimiliki pada sebuah negara dengan paham demokrasi. Indonesia, bila kita tinjau dari pendapat Hendry B. Mayo yang mengemukakan beberapa nilai yang mendasari demokrasi, yakni:<sup>1</sup>

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat kepentingan serta tingkah laku.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Dari berbagai kriteria yang dikemukakan oleh Hendri B. Mayo tersebut,

---

<sup>1</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 118

tidak diragukan lagi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Selain terdapat kebebasan beragama, berkumpul dan berserikat, Indonesia juga menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan.

Dalam studi ilmu politik memilih wakil oleh terwakil dan pemimpin oleh yang dipimpin memiliki tempat kajian tersendiri yang hingga sekarang masih hangat untuk dikembangkan dan diperbincangkan dalam sebuah penelitian. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dan hal tersebut menjadi pendorong kuat atas perubahan sistem pemilihan kepala daerah dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan hak politik rakyat untuk memilih gubernur dan bupati/walikota serta pasangan masing-masingnya secara langsung, barulah kemudian lahir beberapa UU mengenai pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah seperti yang terakhir ialah UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang. Dengan semakin terbukanya kesempatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya maka menjadi parameter tersendiri dalam melihat pertumbuhan

demokrasi di Indonesia.

Dalam pemilu atau pilukada, tindakan pemilih dalam memberikan suaranya disebut dengan perilaku memilih (*voting behavior*). Sebenarnya perilaku memilih merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil dari masyarakat karena hal itu hanya menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.<sup>2</sup> Meskipun demikian penelitian perilaku memilih menjadi sangat menarik dikarenakan kemajemukan masyarakat Indonesia baik ditinjau dari segi agama, suku, bahasa, serta etnis yang ada. Perbedaan yang mendasar tersebut ternyata mampu mempengaruhi perbedaan cara pandang politik suatu kelompok yang berpengaruh pada perbedaan perilaku memilih mereka. Oleh karena itu kajian perilaku memilih (*Voting Behavioral*) merupakan suatu kajian yang kompleks serta menarik.

Untuk mengetahui bagaimana perilaku memilih individu tersebut berlangsung, ternyata ada banyak faktor yang memiliki hubungan terhadap kecenderungan perilaku memilih individu tersebut. Penekanan penjelasan masing-masing faktor tersebut menyebabkan munculnya mashab-mashab dalam menganalisa perilaku memilih individu.<sup>3</sup> Terdapat tiga pendekatan utama dalam memahami perilaku memilih individu, yakni mashab sosiologi, psikologis dan ekonomis.

Beragam etnis, suku dan budaya yang ada di Indonesia memang memiliki pengaruh tersendiri dalam seseorang memutuskan pilihan politiknya dalam suatu pemilu dan pilukada. Dalam pendekatan sosiologis, menekankan kepada faktor-faktor sosiologis dalam menjelaskan perilaku memilih individu seperti

---

<sup>2</sup> Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under Hegemone*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, Hal 2

<sup>3</sup> Asrinaldi, *Politik Masyarakat Miskin Kota*, Gava Media, Yogyakarta, 2012, Hal. 24

aspek lingkungan sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, faktor orang tua, pekerjaan seseorang, tempat tinggal, faktor usia, jenis kelamin dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Etnisitas memang menjadi variabel tersendiri dalam seseorang menentukan pilihan politiknya. Loyalitas-loyalitas yang berkembang di Indonesia dari pemilih terhadap terpilih atau kandidat merupakan peran penting kesamaan etnis, sehingga bukan tidak mungkin seorang pemilih memilih kandidat yang memiliki kesamaan etnis dengannya.

Menurut Saiful Mujani, Liddle dan Ambardi, terkait dengan masalah kelas sosial dan sentimen keagamaan, ras dan etnik juga dipercaya sebagai faktor sosiologis yang mempengaruhi bagaimana seseorang memilih partai politik atau calon pejabat publik. Partai yang secara tradisional memperjuangkan kesetaraan ras dan etnik cenderung didukung oleh kelompok-kelompok ras dan etnik minoritas karena kelompok inilah yang berkepentingan langsung dengan isu tersebut. Secara lebih khusus, kesamaan ras dan etnik antara pemilih dan calon pejabat publik cenderung mempengaruhi perilaku memilih seseorang.<sup>5</sup>

Pendekatan lain yang juga memiliki peranan penting dalam menjelaskan perilaku memilih masyarakat dan individu ialah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini mengidentifikasi perilaku memilih individu dari proses sosialisasi yang mereka dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang adalah refleksi dari kepribadiannya dan menjadi variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik individu tersebut. Karenanya menurut Niemy & Weisberg pendekatan psikologis

---

<sup>4</sup> Asrinaldi, *Ibid*, Hlm. 25

<sup>5</sup> Saiful Mujani, R. William Liddle, & Kuskridho Ambardi, 2011, *Kuasa Rakyat : Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Mizan Publika: Jakarta, hlm. 14.



mengaitkannya dengan tiga aspek utama pendekatan psikologis ini, ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu yang berkembang, dan orientasi terhadap kandidat.<sup>6</sup>

Pendekatan selanjutnya yang lahir sebagai sebuah alternatif untuk mengetahui seberapa jauh individu mampu bertindak rasional dalam pilihan politiknya ketika pemilu ataupun pemilukada ialah pendekatan ekonomi atau dikenal juga dengan mashab rasional. Mashab ekonomi ini berangkat dari asumsi dasarnya bahwa individu cenderung bertindak rasional, yaitu memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari tindakannya dan meminimalkan efek negatif dari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>7</sup> Model ini bertumpu pada asumsi bahwa pilihan politik banyak dibentuk oleh evaluasi atas kondisi ekonomi, personal, maupun kolektif. Dalam karya klasiknya, *Economic Theory of Democracy*, Antoni Downs menyatakan bahwa evaluasi positif warga terhadap kondisi ekonomi akan memberikan *reward* (ganjaran) terhadap pejabat yang sedang menjabat. Sebaliknya, jika evaluasi negatif, maka dia akan memberikan hukuman terhadapnya dengan cara memilih pihak oposisi. Dalam hal ini, evaluasi didasarkan pada informasi tentang kondisi ekonomi.<sup>8</sup>

Dalam mashab ekonomi, Fiorina (1981) menegaskan, seseorang pemilih yang rasional akan mengaitkan tindakan yang dilakukannya dengan kejadian masa lalu (retrospektif). Proses retrospektif ini membutuhkan informasi terkait dengan partai, kandidat dan kebijakan yang dievaluasi oleh individu. Semakin banyak informasi yang diperoleh, maka semakin baik hasil evaluasi yang

---

<sup>6</sup> Niemy & Weisberg sebagaimana dikutip Asrinaldi, *Op. Cit*, hlm. 31.

<sup>7</sup> Asrinaldi, *Op.Cit*, Hlm. 41

<sup>8</sup> Dawns sebagaimana dikutip Saiful Mujani, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

dilakukan.<sup>9</sup> Artinya ialah model pilihan rasional menyederhanakan masalah ini : orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya : kehidupan ekonomi. Bagaimana seorang pemilih mengetahui bahwa calon atau partai tertentu dapat membantu mencapai kepentingan ekonominya tersebut tidak membutuhkan informasi yang terlalu detail dan akurat dari seorang pemilih atas posisi calon atau partai untuk memenuhi janji-janjinya. Cukup dengan mempersepsikan keadaan ekonomi dirinya (*egosentrik*) dibawah sebuah pemerintahan (partai atau calon) tertentu sekarang ini dibanding sebelumnya (*retrospektif*), dan yang akan datang dibanding sekarang (*prospektif*); dan evaluasi umum seorang pemilih atas keadaan ekonomi nasional (*sosiotropik*) dibawah pemerintahan sekarang dibanding tahun sebelumnya (*retrospektif*), dan keadaan ekonomi nasional di bawah pemerintahan sekarang dibanding tahun-tahun yang akan datang (*prospektif*).<sup>10</sup>

Namun bagaimanapun juga dalam realitas sebuah pemilihan umum tingkat nasional maupun daerah, permasalahan mengenai untung-rugi sebuah tindakan memilih dan kepentingan individu maupun kelompok menjadi suatu kajian yang menarik dan penting untuk dilakukan. Oleh karenanya, peneliti merasa tertarik dengan teori patronase politik dalam pemilukada Kab. Pasaman Barat tahun 2015. Patronase sendiri merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas

---

<sup>9</sup> Fiorina sebagaimana dikutip Asrinaldi Op.Cit., hlm. 44-45

<sup>10</sup> Downs 1956, dalam Wheaterford dan Kiewiet, 1980; Fiorina, 1981; Lewis-Beck, 1998, sebagaimana dikutip Saiful Mujani dkk. Op.Cit., hlm. 33.

(misalnya, lapangan sepakbola baru untuk para pemuda disebuah kampung).<sup>11</sup> Patronase sendiri peneliti pahami sebagai upaya untuk memperoleh dukungan masyarakat sebagai pemilih dengan merujuk kepada pemberian materi oleh kandidat atau keuntungan lain yang didistribusikan kepada pemilih tersebut. Sehingga tidak bisa dipungkiri cara-cara tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang dipilih oleh kandidat dalam memperoleh dukungan-dukungan politik dalam pemilu ataupun pilukada.

Faktor-faktor sosiologis yang telah seperti membudaya dalam perilaku memilih masyarakat Indonesia serta mulai terlihatnya faktor ekonomi yang merupakan kecendrungan memilih di Indonesia juga nampak terlihat pada perilaku memilih masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Adanya kecenderungan *pemilih retrospektif* dan *patronase politik* pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2015 di Kabupaten Pasaman Barat membuat penelitian akan menarik untuk dilakukan. Pada pilukada yang diselenggarakan pada tahun 2015 yang dikatakan pilukada serentak yang diikuti oleh 13 kabupaten/kota serta Provinsi Sumatera Barat sendiri yang memilih Gubernur /wakil gubernurnya. Dalam UU No. 8 Tahun 2015 Tentang pemilihan kepala daerah gubernur dan bupati/ wali kota, dikatakan bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak. Hanya saja, pelaksanaan serentak nasional itu baru benar-benar bisa dilaksanakan pada tahun 2027.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 13 Kabupaten/kota yang mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Terdapat tiga pasangan calon bupati/wakil bupati yang bertarung pada pilukada di Kab.

---

<sup>11</sup> Edwar Aspinal & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan klientisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta, 2015, Penerbit PolGov, Hlm. 4

Pasaman Barat tersebut, yakni pasangan Syahiran-Yulianto yang diusung oleh partai Gerindra dan Demokrat, pasangan Hamsuardi-Kartuni yang diusung oleh partai Hanura, PAN, dan PKS, dan yang ketiga ialah pasangan Zulkenedi Said-Risnawanto yang diusung oleh partai Golkar, PDIP, dan NasDem. Dalam pemilukada Kabupaten Pasaman Barat tersebut pasangan Syahiran-Yulianto berhasil mengungguli pasangan calon lain. Untuk lebih jelas maka akan ditampilkan hasil perolehan suara pilpub Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015.

**Tabel 1.1**  
**Hasil Hitung TPS KPU Kabupaten Pasaman Barat**  
**Perolehan Suara Pilpub Pasaman Barat Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Hasil Perolehan Suara		
				1 Hamsuardi Kartuni	2 Zulkenedi Said Risnawanto	3 Syahiran Yulianto
1.	Gunuang Tuleh	14.735	10.401	1.965	2.827	<b>5.449</b>
2.	Kinali	37.068	23.870	5.721	<b>9.911</b>	7.637
3.	Koto Balingka	17.999	11.747	2.889	2.995	<b>5.591</b>
4.	Lembah Melintang	28.776	18.366	<b>9.395</b>	1.408	7.115
5.	Luhak Nan Duo	24.993	17.247	2.365	<b>8.953</b>	5.527
6.	Pasaman	40.985	26.516	5.196	<b>10.587</b>	9.767
7.	Ranah Batahan	16.760	12.156	2.137	2.746	<b>7.065</b>
8.	Sasak Ranah Pasisie	9.084	7.305	641	<b>5.317</b>	1.415
9.	Sungai Aua	21.176	14.296	<b>6.832</b>	1.752	5.259
10.	Sungai Beremas	14.977	8.126	2.167	2.196	<b>3.310</b>
11.	Talamau	19.109	10.791	2.532	<b>5.337</b>	2.591
<b>Total</b>		<b>245.662</b>	<b>160.821</b>	<b>41.840</b>	<b>54.029</b>	<b>60.726</b>
<b>Presentase (%)</b>				<b>26,72%</b>	<b>34,50%</b>	<b>38,78%</b>

Sumber : Data Sekunder KPU Pasaman Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pasangan Syahiran-Yulianto berhasil memperoleh suara sebanyak 60.726 (38,78%), mengungguli pasangan lainnya Hamsuardi-Kartuni 41.840 (26,72%) dan Zulkenedi Said-Risnawanto dengan perolehan suara 54.029 (34,50%). Dengan demikian hasil dari perhitungan TPS, maka pasangan Syahiran-Yulianto keluar sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan bupati Kabupaten Pasaman Barat periode 2015-



2020. Jika dianalisa lebih jauh kemenangan Syahiran-Yulianto memang terdapat pada daerah yang dipadati oleh etnis mandailing, seperti pada Kec. Sungai Beremas, Kec. Ranah Batahan, Kec. Gunung Tuleh, dan Kec. Koto Balingka.

Sementara untuk pasangan Zulkenedi Said-Risnawanto berhasil mendapatkan suara tertinggi di Kecamatan Kinali, Luhak Nan Duo, Pasaman, dan Kecamatan Talamau yang memang didominasi oleh etnis minang. Berbeda halnya dengan pasangan kandidat Hamsuardi-Kartuni yang berhasil mendapatkan suara terbanyak pada Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Sungai Aua yang didominasi oleh etnis mandailing. Dalam analisa kemenangan masing-masing kandidat pada kecamatan-kecamatan yang ada di Pasaman Barat memang tidak dapat dipisahkan dengan mazhab sosiologis, dimana perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang salah satunya ialah afiliasi etnik.

Dalam tinjauan peneliti, Kabupaten Pasaman Barat ialah sebuah kabupaten yang dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, seperti etnis minang dengan jumlah komposisi penduduk mencapai 40%, etnis jawa dengan jumlah komposisi penduduk mencapai 20%, dan etnis mandailing yang berjumlah 40%.<sup>12</sup> Dengan demikian maka Kab. Pasaman Barat merupakan kabupaten dengan masyarakat multi etnis, yakni masyarakat yang majemuk (plural) sebagaimana realitas yang dikemukakan Suryadinata bahwa jumlah etnis dan subetnis di Indonesia sampai saat ini diperkirakan telah

---

<sup>12</sup> Tidak ada data pasti perihal etnisitas yang dimiliki oleh Kab. Pasaman Barat (misal dari BAPPEDA dan CAPIL), namun dalam profil Pasaman Barat dikatakan bahwa Kab. Pasaman Barat ialah daerah multi etnis. Dalam hal pembagian jumlah etnis bias ditelisik melalui: Lihat <http://lsmwampel.com/News/ANCAMAN%20PERPECAHAN%20ETNIS.pdf> , diakses pada tanggal 15 Januari 2015

mencapai lebih dari seribu kelompok.<sup>13</sup>

Adanya keberagaman etnis di Kabupaten Pasaman Barat ini juga menjadi pertarungan tersendiri bagi para kandidat untuk mendapatkan simpatik bagi kaum etnis lainnya. Tiga pasangan calon bupati Pasaman Barat masing-masingnya merupakan pasangan yang dipadu berdasarkan etnis yang berbeda, seperti pasangan dengan nomor urut satu misalnya, yakni Hamsuardi dari etnis mandailing bersandingan dengan Kartuni dari etnis minang, pasangan nomor urut dua dimana Zulkaneidi Said dari etnis minang berpasangan dengan Risnawanto dari etnis Jawa, dan yang terakhir pasangan pemenang pemilu yakni Syahiran dari etnis Mandailing berpasangan dengan Yulianto dari etnis jawa. Adanya pemasangan-pemasangan tersebut tak lepas dari tujuan yang dicapai sehingga kandidat berharap dapat memperoleh suara yang maksimal, artinya ada pengaruh tersendiri dari sentimen etnis yang melekat pada diri kandidat dengan perilaku memilih masyarakat Pasaman Barat.

Identitas etnik akan membuat seseorang memiliki harapan akan masa depan yang berkait dengan etnisnya. Jadi dengan beragam etnis yang ada di Indonesia dan Kabupaten Pasaman Barat khususnya maka isu etnisitas ini menjadi sangat sering dimainkan dan dimunculkan disetiap adanya pemilihan umum, baik eksekutif maupun legislatif. Banyak bermunculan spanduk-spanduk mengenai kandidat yang merupakan bergelar suatu adat menunjukkan bahwa isu kesamaan etnis menjadi daya tarik tersendiri ditengah pemilihan umum kita, termasuk pemilukada diberbagai daerah terutama daerah yang heterogen layaknya Kabupaten Pasaman Barat.

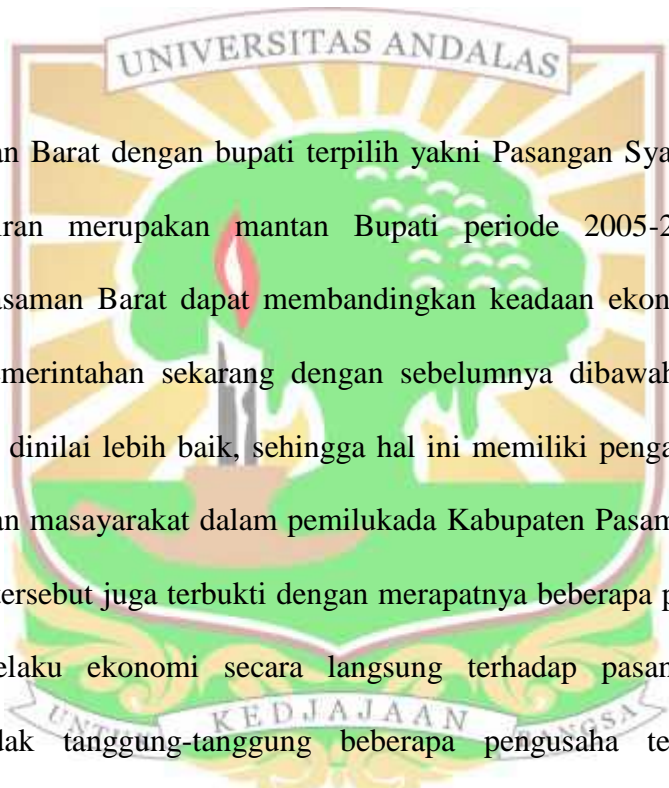
---

<sup>13</sup> Said Agil Munawar Husin al Munawar, 2006, *Fikih Kehidupan antar Agama Menata Masyarakat Berbasis Multikultural*, dalam Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama, Gunung Djati Press, Bandung, hlm 130

Pada Kabupaten Pasaman Barat sendiri, isu etnis sangat merebak diberbagai pembicaraan dari berbagai kalangan. Peneliti yang berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat sendiripun tidak merasa asing lagi jikalau masyarakat memulai pembicaraannya mengenai ketiga pasangan calon dari etnis mana pasangan tersebut berasal. Kemudian pembicaraan akan berlanjut mengenai masing-masing pasangan yang disandingkan, tidak jarang hasil pembicaraan dari kedai ini menjadi acuan suatu masyarakat untuk memilih pasangan tertentu. Dan sekali lagi etnis menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Pasaman Barat khususnya dalam membedah profil calon yang sedang bertarung di ranah kabupaten. Sehingga pada penelitian ini peneliti mencantumkan salah satu variabel yang digunakan ialah etnisitas dalam melihat perilaku memilih masyarakat Pasaman Barat terhadap pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 ini.

Selain hal diatas, Pasangan Syahiran-Yulianto sebagai pasangan pemenang pemilukada juga memperoleh suara yang cukup signifikan diberbagai daerah lain yang memang secara kultural tidak didominasi etnis mandailing seperti yang peneliti gambarkan terdahulu, hal tersebut menurut dugaan awal peneliti ialah terdapatnya hubungan pemilih retrospektif (*retrospective voter*). Seperti yang kita ketahui dalam model pilihan rasional orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya : kehidupan ekonomi. Bagaimana seorang pemilih mengetahui bahwa calon atau partai tertentu dapat membantu mencapai kepentingan ekonominya tersebut tidak membutuhkan informasi yang terlalu detail dan akurat dari seorang pemilih atas posisi calon atau partai untuk

memenuhi janji-janjinya. Cukup dengan mempersepsikan keadaan ekonomi dirinya (egosentrik) dibawah sebuah pemerintahan (partai atau calon) tertentu sekarang ini dibanding sebelumnya (retrospektif), dan yang akan datang dibanding sekarang (prospektif); dan evaluasi umum seorang pemilih atas keadaan ekonomi nasional (sosiotropik) dibawah pemerintahan sekarang dibanding tahun sebelumnya (retrospektif), dan keadaan ekonomi nasional di bawah pemerintahan sekarang dibanding tahun-tahun yang akan datang (prospektif).<sup>14</sup>



Pasaman Barat dengan bupati terpilih yakni Pasangan Syahiran-Yulianto, dimana Syahiran merupakan mantan Bupati periode 2005-2010, sehingga masyarakat Pasaman Barat dapat membandingkan keadaan ekonomi khususnya pada masa pemerintahan sekarang dengan sebelumnya dibawah pemerintahan Syahiran yang dinilai lebih baik, sehingga hal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pilihan masyarakat dalam pemilukada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 ini. Hal tersebut juga terbukti dengan merapatnya beberapa pengusaha yang merupakan pelaku ekonomi secara langsung terhadap pasangan Syahiran-Yulianto. Tidak tanggung-tanggung beberapa pengusaha tersebut bahkan mengikuti dan hadir pada kampanye akbar pasangan Syahiran-Yulianto tersebut.

<sup>15</sup> Ramlan Lubis Raja Bor Bor misalnya, seorang pengusaha pinang yang melibatkan dirinya menjadi timses pasangan Syahiran-Yulianto, terlibat dalam beberapa kegiatan kampanye dengan dana yang diperoleh dari uang pribadinya, hal tersebut dilakukan karena pengharapannya yang tinggi akan perbaikan nilai

---

<sup>14</sup> Downs 1956, dalam Wheaterford dan Kiewiet, 1980; Fiorina, 1981; Lewis-Beck, 1998, sebagaimana dikutip Saiful Mujani dkk. *Loc. Cit*

<sup>15</sup> Lihat <http://sumbarsatu.com/Berita/11625-Pilkada-Pasaman-%2DKampanye-%2DSAIYO-%2DDipadati-Ribuan-Massa.html> ,diakses pada tanggal 8 Maret 2016



harga jual pinang dibawah pemerintahan syahiran kelak seperti saat ia pernah menjabat dahulu katanya.<sup>16</sup>

Selain pengaruh etnisitas dan dengan terkemukanya beberapa pemilih retrospektif pada pilkada Kab. Pasaman Barat hal lain yang cukup menarik ialah adanya patronase politik yang dibangun oleh kandidat terhadap pemilihnya membuat pilkada serentak khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati Pasaman Barat tahun 2015 menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Sejatinya para kandidat akan diberikan waktu kampanye dalam mengikuti pemilukada, namun hal semacam kampanye diluar jadwal yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum pun marak dilakukan oleh berbagai calon dengan cara-cara yang membuat hubungan paronase terhadap pemilihnya. Hal tersebut juga terlihat jelas pada pilkada Kab. Pasaman Barat, namun memang tidak semua diberitakan dimedia-media massa karena memang minimnya akses media di Kab. Pasaman Barat sendiri.

Kandidat pemenang misalnya, Syahiran sendiri dalam kasus patronase telah membentuk jaringannya sesaat sebelum masa kampanye dimulai. Dalam sebuah pemberitaan *online* Syahiran diberitakan tengah mengadakan kegiatan bagi-bagi pulsa hingga mencapai angka lima juta rupiah dengan dalil agar masyarakat dapat sama-sama memberikan dukungan terhadap salah satu warga disebuah kecamatan yang ketika itu peneliti ketahui tengah berjuang didalam sebuah kontes ajang pencarian bakat menyanyi.<sup>17</sup> Dalam pembahasan ini seperti

---

<sup>16</sup> Informasi diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber pada tanggal 14 Januari 2015

<sup>17</sup> Lihat: <http://www.sumbarsatu.com/Berita/9891-Pasangan-Balonbup-Pasaman-Barat-Syahiran-Sudirman-Belikan-Pulsa-Rp5-Juta-untuk-Dukung-Artis-KDI-Rizi.html>

yang telah peneliti ungkapkan sebelumnya bahwa patronase dengan lima variasi bentuknya marak terjadi pada pilkada Kab. Pasaman Barat tahun 2015. Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat sering kali menyediakan atau membiayai beragam aktifitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum ialah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum tersebut, para kandidat mempromosikan dirinya.<sup>18</sup> Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Edwar Aspinal & Mada Sukmajati tersebut terkait bentuk-bentuk patronase, maka apa yang telah peneliti paparkan tersebut sebagai salah satu bentuk politik patronase yang dibangun oleh salah satu kandidat, dengan menghadiri salah satu kegiatan, kemudian beliau diberikan panggung, menyatakan sikap akan dukungan kepada salah seorang warga, dan membagikan uang guna dibelikan pulsa sebagai cara mendukung salah satu warga tersebut.

Apa yang penulis coba kemukakan diatas hanya sebahagian kecil dari banyak pola patronase politik yang terjadi menjelang pemilukada Kab. Pasaman Barat tahun 2015 dilakukan. Belum lagi mencakup bantuan-bantuan masjid yang diberikan oleh-masing kandidat yang secara keilmuan termasuk kedalam langkah patronase politik meski memang secara hukum dan aturan kampanye tidak dikatakan sesuatu yang melanggar. Namun kembali lagi peneliti tegaskan bahwa penelitian ini pada dasarnya melihat dan mengkaji terkait perilaku memilih masyarakat pasmana barat dan variabel-variabel yang mempengaruhi bukan serta merta masuk keranah hukum dan membuat pernyataan tindakan salah dari salah satu kandidat pilkada.

---

<sup>18</sup> Edwar Aspinal & Mada Sukmajati, op. cit. Hlm 26

Berdasarkan realita diatas, jelas terlihat bahawa kemajemukan masyarakat Pasaman Barat membuat tiga variabel dalam teori perilaku memilih menjadi kecenderungan tersendiri dalam menjatuhkan pilihan politiknya terhadap pasangan Syahiran-Yulianto pada pemilukada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015. Adanya pengaruh etnisitas dalam menjatuhkan pilihan politik masyarakat Pasaman Barat serta adanya *pemilih retrospektif* yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat Pasaman Barat dalam hal menjatuhkan pilihan politiknya pada pemilukada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 ini yang merasa perekonomian jauh lebih maju saat Syahiran memerintah dahulu dan ditambah lagi dengan adanya dan munculnya pola patronase politik antara kandidat dengan pemilihnya pada pilkada Pasaman Barat tahun 2015 menjadikan penelitian terkait perilaku memilih di Kabupaten Pasaman Barat menjadi sangat menarik untuk diteliti.

Keadaan dengan keberagaman etnis yang ada di Kabupaten Pasaman Barat serta adanya perbandingan kondisi yang lebih baik dirasakan ketika Syahiran menjabat (*retrospective*), kemudian terbentuknya pola patronase politik membawa dampak tersendiri terhadap perilaku memilih pemilih di Kabupaten Pasaman Barat terhadap pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati tahun 2015.

Adanya kecendrungan faktor-faktor sosiologis serta pemilih rasional dalam memilih inilah maka peneliti tertarik untuk melihat perilaku memilih masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada pilbub Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015. Kecendrungan faktor-faktor sosiologis dan rasional dalam perilaku memilih masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat dilihat dengan tiga teori yang dipakai dalam penelitian ini. Ketiga teori tersebut menggunakan dua pendekatan,

yaitu pendekatan sosiologis yang menjelaskan bahwa perilaku memilih masyarakat dipengaruhi oleh etnisitas dan pendekatan pemilih rasional yang menjelaskan bahwa perilaku memilih masyarakat yang tergolong pemilih retrospektif, serta nampak jelasnya ada pola hubungan patronase politik yang dibentuk oleh kandidat.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melihat adanya hubungan etnisitas, *pemilih retrospektif*, serta patronase politik terhadap perilaku memilih masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat pada tahun 2015. Agar penelitian ini dapat terarah pada sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan etnisitas terhadap perilaku memilih masyarakat multi etnis pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015?
2. Bagaimana hubungan *retrospectiv voter* perilaku memilih masyarakat multi etnis pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015?
3. Bagaimana hubungan patronase politik kandidat terhadap perilaku memilih masyarakat multi etnis pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Seperti yang telah dipaparkan di dalam latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :



1. Untuk menjelaskan hubungan etnisitas terhadap perilaku memilih masyarakat multi etnis Kabupaten Pasaman Barat pada Pemiluakada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.
2. Untuk menjelaskan bagaimanakah hubungan *retrospectiv voter* terhadap perilaku memilih masyarakat multi etnis Kabupaten Pasaman Barat pada Pemiluakada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.
3. Untuk menjelaskan hubungan patronase politik kandidat terhadap perilaku memilih masyarakat multi etnis Kabupaten Pasaman Barat pada Pemiluakada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.

### **Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan perilaku memilih khususnya perilaku memilih masyarakat dan penelitian ini juga bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai perilaku pemilih.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai perilaku memilih masyarakat dan menjadi bahan masukan bagi pasangan kandidat dan tim suksesnya untuk menghadapi Pemiluakada Serentak Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat mendatang.

